

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konservasi Mangrove di Tengah Pembangunan Infrastruktur KEK Mandalika: Studi Kasus di Desa Mertak

Harum Sri Wahyuni¹, Diswandi², Baiq Saripta Wijimulawiani³

^{1,2,3}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: Harumsriwahyuni07@gmail.com

Article History:

Received: 24 Desember 2025

Revised: 27 Februari 2026

Accepted: 07 Maret 2026

Kata Kunci: Mangrove, Pemberdayaan Masyarakat, Konservasi, KEK Mandalika, Desa Mertak.

Abstrak: Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika memberikan tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem mangrove di Desa Mertak sebagai wilayah pesisir penyangga kawasan pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi konservasi mangrove serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestariannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekosistem mangrove di Desa Mertak belum optimal akibat aktivitas penebangan, pembangunan infrastruktur, serta lemahnya pemeliharaan pasca penanaman. Keterlibatan masyarakat masih bersifat terbatas dan cenderung hanya pada tahap penanaman, tanpa keterlibatan aktif dalam pengelolaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Ketidadaan kelembagaan pengelola dan regulasi desa (Peraturan Desa) menjadi hambatan utama dalam mewujudkan konservasi mangrove yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan lokal, penyusunan regulasi desa, peningkatan kapasitas masyarakat, kolaborasi multipihak, serta pengembangan alternatif ekonomi berbasis lingkungan sebagai strategi konservasi mangrove berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mangrove tidak hanya berperan sebagai pelindung alami dari abrasi, intrusi air laut, dan badai, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai biota, penyedia jasa ekosistem, serta sumber penghidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, keberadaan mangrove menjadi komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekologi wilayah pesisir (Zakiyah et al., 2023). Selain fungsi ekologis, ekosistem mangrove juga memiliki potensi ekonomi melalui pengembangan ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta kegiatan sosial-budaya

yang berkelanjutan (Rahim et al., 2017). Oleh karena itu, keberlanjutan ekosistem mangrove menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir.

Namun, pembangunan infrastruktur berskala besar di wilayah pesisir sering kali memberi tekanan signifikan terhadap kelestarian ekosistem mangrove. Kondisi ini terlihat jelas di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional. Pembangunan fasilitas seperti jalan, hotel, dan sirkuit internasional telah membuka peluang ekonomi baru, tetapi di sisi lain menimbulkan perubahan tata ruang, peningkatan konversi lahan, serta degradasi ekosistem, termasuk pada kawasan mangrove di Desa Mertak yang menjadi lokasi penelitian ini (Sukuryadi et al., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembangunan KEK Mandalika berdampak nyata pada menurunnya kualitas ekosistem mangrove. Analisis citra satelit yang dilakukan oleh Sukuryadi et al., (2025) menunjukkan penurunan tutupan mangrove hingga 44,22% dalam kurun waktu 2019–2022. Selain penurunan luasan, penelitian Hamit et al., (2025) menemukan bahwa tingkat keberlanjutan pengelolaan mangrove di kawasan Mandalika masih rendah, terutama pada dimensi ekologi dan kelembagaan akibat lemahnya regulasi, minimnya rehabilitasi, serta ketiadaan lembaga pengelola khusus. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan pembangunan belum diimbangi dengan sistem pengelolaan lingkungan yang memadai.

Desa Mertak merupakan salah satu desa pesisir yang berada di sekitar kawasan KEK Mandalika dan memiliki ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai penyangga ekologis sekaligus sumber penghidupan masyarakat lokal. Sebagian besar masyarakat Desa Mertak berprofesi sebagai nelayan, petani, dan peternak yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya pesisir. Dalam konteks ini, keberlanjutan ekosistem mangrove sangat menentukan keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat setempat. Namun, berbagai indikasi kerusakan mangrove dan lemahnya pengelolaan menunjukkan bahwa upaya konservasi yang ada belum berjalan secara optimal.

Secara umum, kajian-kajian sebelumnya di kawasan KEK Mandalika lebih banyak menitikberatkan pada analisis perubahan tutupan mangrove dan dampak ekonomi pembangunan pariwisata. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pemberdayaan masyarakat, tingkat keterlibatan masyarakat, serta peran kelembagaan lokal dalam konservasi mangrove di sekitar KEK Mandalika masih relatif terbatas. Padahal, pengelolaan mangrove berbasis masyarakat diyakini mampu meningkatkan efektivitas konservasi melalui pemanfaatan pengetahuan lokal, penguatan rasa memiliki, dan peningkatan kapasitas kelembagaan komunitas (Rahmawaty, 2006 dalam Rahim et al., 2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana konservasi mangrove dan keterlibatan masyarakat berlangsung di tengah tekanan pembangunan infrastruktur pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi konservasi mangrove, tingkat keterlibatan masyarakat, serta hambatan kelembagaan dalam upaya pelestarian mangrove di Desa Mertak sebagai desa penyangga KEK Mandalika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian ekonomi sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, pengelola KEK Mandalika, dan masyarakat lokal dalam merancang strategi konservasi mangrove yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama melalui peningkatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi dalam

memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Chambers (1995) dalam Zubaedi (2013), pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Jim Ife dalam Zubaedi (2013) menekankan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan penguatan daya masyarakat melalui akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan agar mampu menentukan masa depannya sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan (Dedeh Maryani, 2019). Masyarakat yang berdaya cenderung mendorong pembangunan yang lebih cepat dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan konservasi mangrove, terutama di tengah pembangunan KEK Mandalika, melalui penguatan pengetahuan lingkungan, keterampilan teknis, dan kelembagaan lokal.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Arnstein (1969) melalui teori *Ladder of Participation* menjelaskan bahwa partisipasi yang efektif berada pada tingkat *citizen power*, yaitu ketika masyarakat memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar partisipasi semu.

Dalam konservasi mangrove di Desa Mertak, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konservasi di tengah pembangunan KEK Mandalika dapat meningkatkan rasa memiliki, memperkuat pemberdayaan, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Konservasi Mangrove

Konservasi mangrove merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan untuk menjaga fungsi ekologis dan manfaat sosial ekonomi masyarakat pesisir. Dahuri (2001) dalam Zakiyah et al., (2023) menyatakan bahwa konservasi mangrove harus dilakukan melalui pendekatan *multi-purpose management*, yaitu perlindungan lingkungan yang disertai pemanfaatan secara lestari dengan melibatkan masyarakat. Keberhasilan konservasi mangrove sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat pesisir melalui pendekatan *bottom-up* agar pengelolaan mangrove berjalan berkelanjutan.

Pembangunan Berkelanjutan

Menurut *Brundtland Report* (1987) dalam Cahyandito (2010), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Salim (2010) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup empat pilar utama, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Keempat pilar tersebut saling terkait dan menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur KEK Mandalika, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan pesisir, khususnya ekosistem mangrove. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove merupakan bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi

pariwisata diimbangi dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

The Cammon Poll Resources Manajemen

Manajemen Sumber Daya Bersama (*Common Pool Resources Management*) merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki dan dimanfaatkan bersama oleh banyak pihak, dengan tujuan menjaga keberlanjutan dan keadilan pemanfaatannya. Sumber daya dikategorikan sebagai *common pool resources* apabila memiliki banyak pengguna, sulit membatasi akses (non-excludable), dan bersifat rival dalam konsumsi, sehingga penggunaan oleh satu pihak mengurangi kesempatan pihak lain (Ostrom, 2008 dalam Hadipuro, 2022).

Pengelolaan CPR penting untuk mencegah terjadinya *tragedy of the commons*, yaitu eksploitasi berlebihan akibat perilaku individu yang mengutamakan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak kolektif (Hardin, 1968). Tragedi ini umumnya dipicu oleh lemahnya regulasi, rendahnya kesadaran kolektif, serta tidak adanya sistem pengelolaan dan pengawasan yang jelas (Tarumingkeng, 2024).

Elinor Ostrom (1990) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pengaturan kolektif berbasis komunitas lokal, dengan aturan yang jelas, partisipasi aktif, dan mekanisme pengawasan bersama. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara sistem sosial dan sistem ekologi (*social-ecological system*), di mana perilaku manusia memengaruhi kondisi lingkungan, dan sebaliknya.

Dalam konteks penelitian ini, ekosistem mangrove di Desa Mertak merupakan sumber daya bersama yang rentan terhadap tekanan pembangunan KEK Mandalika. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove perlu didasarkan pada prinsip CPR, dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam strategi pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove di Desa Mertak di tengah pembangunan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan realitas sosial-ekologis secara komprehensif berdasarkan perspektif pelaku dan masyarakat lokal.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang berfokus pada pendalaman fenomena spesifik dalam satu lokasi tertentu dengan konteks yang terbatas. Desain studi kasus dipilih agar peneliti dapat mengkaji secara detail bentuk pemberdayaan masyarakat, dinamika lingkungan pesisir, serta perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Desa Mertak sebagai desa penyangga kawasan pariwisata Mandalika.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi non-partisipan digunakan untuk mengamati kondisi ekosistem mangrove serta aktivitas masyarakat tanpa keterlibatan langsung peneliti. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan pandangan informan terkait konservasi mangrove dan dampak pembangunan KEK Mandalika. Dokumentasi diperoleh dari arsip desa, laporan program konservasi, foto kegiatan, serta dokumen kebijakan yang relevan.

Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, keterlibatan, serta relevansi informan terhadap isu konservasi mangrove dan pembangunan KEK Mandalika. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

Informan kunci merupakan pihak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kondisi sosial dan lingkungan pesisir, serta berperan dalam pengambilan keputusan dan pelestarian nilai-nilai lokal. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yang terdiri dari aparat desa atau kepala dusun serta tokoh masyarakat yang memahami perkembangan konservasi mangrove dan perubahan sosial akibat pembangunan KEK Mandalika.

Informan utama adalah individu yang terlibat langsung dalam kegiatan konservasi mangrove maupun aktivitas ekonomi pesisir yang terdampak pembangunan KEK Mandalika. Informan utama berjumlah 3 orang, meliputi masyarakat yang terlibat dalam penanaman dan pemeliharaan mangrove, nelayan pesisir, serta masyarakat yang mengalami perubahan mata pencaharian akibat pembangunan KEK.

Informan pendukung merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan mangrove, namun memiliki informasi tambahan terkait dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di Desa Mertak. Informan pendukung dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, terdiri dari pelaku usaha lokal dan pemerhati lingkungan yang pernah terlibat dalam kegiatan terkait mangrove.

Pemilihan informan didasarkan pada kriteria:

1. memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait konservasi mangrove;
2. terlibat langsung atau terdampak pembangunan KEK Mandalika; dan
3. bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif tematik yang sistematis. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi dan ketepatan temuan penelitian.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penerapan triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data dan memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi empiris di lapangan secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Konservasi *Mangrove* di Desa Mertak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekosistem mangrove di Desa Mertak masih berada pada tingkat pengelolaan yang belum optimal. Vegetasi mangrove masih ditemukan di beberapa titik pesisir, khususnya di Dusun Sereneng dan Batu Berang, namun keberadaannya terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas penebangan, penggembalaan ternak, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya pemeliharaan pasca penanaman.

Selain itu, pembangunan pesisir yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika turut meningkatkan tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem mangrove.

Berbagai upaya rehabilitasi mangrove telah dilakukan oleh komunitas masyarakat, perguruan tinggi, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Namun, kegiatan penanaman tersebut umumnya belum disertai dengan sistem monitoring dan pemeliharaan yang berkelanjutan, sehingga tingkat keberhasilan rehabilitasi relatif rendah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak mangrove yang ditanam tidak bertahan akibat lemahnya pengelolaan pasca penanaman serta gangguan eksternal, seperti ternak dan kondisi hidrologi yang tidak mendukung.

Selain faktor pengelolaan, kerusakan mangrove juga dipicu oleh aktivitas penebangan untuk kebutuhan kayu bakar serta penimbunan lahan akibat pembangunan infrastruktur pesisir. Pembangunan KEK Mandalika memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan lapangan kerja dan aktivitas usaha masyarakat, namun pada saat yang sama menimbulkan tekanan terhadap lingkungan pesisir, terutama akibat pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung.

Meskipun demikian, mangrove yang berhasil tumbuh memberikan manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Keberadaan mangrove berfungsi sebagai habitat berbagai biota perairan, seperti ikan, udang, dan kepiting, yang berkontribusi terhadap peningkatan hasil tangkapan nelayan. Temuan ini menunjukkan bahwa mangrove memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *multi-purpose management* yang dikemukakan oleh Dahuri (2001) dalam Zakiyah et al. (2023), yang menekankan bahwa konservasi mangrove tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada pemanfaatan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi konsep tersebut di Desa Mertak belum berjalan optimal akibat minimnya pemeliharaan, lemahnya pengelolaan, serta ketiadaan regulasi desa yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemanfaatan mangrove.

Dengan demikian, konservasi mangrove di Desa Mertak masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan berkelanjutan berbasis masyarakat. Penguatan kelembagaan lokal, penyusunan Peraturan Desa (Perdes), serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi ekologis dan ekonomi mangrove menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan mangrove di masa mendatang.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Konservasi *Mangrove*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove di Desa Mertak belum berjalan secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya kerangka kelembagaan dan regulasi yang secara jelas mengatur pengelolaan mangrove berbasis masyarakat. Hingga saat ini, belum terdapat payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan konservasi mangrove, sehingga kegiatan yang dilakukan masih bersifat sporadis dan tidak terarah. Ketidadaan regulasi tersebut berdampak pada lemahnya sistem pengelolaan dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak eksternal. Selain itu, belum terbentuknya kelompok pengelola mangrove secara formal menyebabkan kegiatan konservasi tidak berkelanjutan dan bergantung pada inisiatif sementara. Masyarakat menilai bahwa pembentukan kelompok pengelola resmi serta pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan agar kegiatan konservasi dapat berjalan secara konsisten.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Chambers (1995) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga

menciptakan alternatif pertumbuhan ekonomi yang berbasis lokal dan berkelanjutan. Hal tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Desa Mertak yang menilai pentingnya peningkatan pemahaman mengenai manfaat ekonomi mangrove sebagai dasar penguatan partisipasi dan keberlanjutan program konservasi.

Selanjutnya, Jim Ife dalam Zubaedi (2013) menekankan bahwa pemberdayaan berkaitan erat dengan konsep *power* dan *disadvantage*, di mana masyarakat perlu dibekali dengan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan agar mampu menentukan pilihan dan masa depannya sendiri. Dalam konteks Desa Mertak, strategi pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada penguatan kapasitas lokal, pembentukan kelembagaan pengelola mangrove, serta pendampingan berkelanjutan sebagai prasyarat keberhasilan konservasi berbasis masyarakat.

Peran Kelembagaan Lokal dalam Mendukung Konservasi *Mangrove*

Minimnya regulasi formal mengenai pengelolaan mangrove di Desa Mertak menunjukkan lemahnya peran kelembagaan lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemanfaatan mangrove. Isu lingkungan memang kerap dibahas dalam forum musyawarah desa, namun belum ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan tertulis yang mengikat. Ketiadaan kelembagaan dan regulasi formal menyebabkan pengelolaan mangrove cenderung bersifat *open access*, sehingga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya menjadi lemah. Kondisi ini berpotensi mendorong eksploitasi berlebih terhadap mangrove tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Mangrove merupakan ekosistem yang tergolong sebagai *common-pool resources* (CPR), yaitu sumber daya yang bersifat non-excludable dan rivalrous, sehingga rentan terhadap eksploitasi berlebihan apabila tidak dikelola secara kolektif (Ostrom, 2008 dalam Hadipuro, 2022). Dalam konteks CPR, ketiadaan aturan lokal berisiko menimbulkan *tragedy of the commons* sebagaimana dikemukakan oleh Hardin (1968), yaitu kondisi ketika individu mengeksploitasi sumber daya demi kepentingan pribadi sehingga merugikan kepentingan kolektif.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kerusakan mangrove di Desa Mertak banyak terjadi akibat aktivitas penebangan dan pemanfaatan tanpa pengawasan. Minimnya payung hukum serta lemahnya kelembagaan lokal menyebabkan kegiatan konservasi tidak berkelanjutan dan tidak memiliki mekanisme pengendalian yang memadai.

Elinor Ostrom (1990) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam akan lebih efektif apabila dilakukan melalui institusi lokal berbasis aturan yang disepakati bersama. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas untuk merumuskan aturan, melaksanakan pengawasan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Dalam konteks Desa Mertak, ketiadaan Perdes menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan mangrove berbasis kelembagaan lokal belum terbentuk secara optimal.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, kelembagaan yang kuat merupakan pilar utama tata kelola lingkungan yang memastikan keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi (Salim, 2010). Pengelolaan mangrove di Desa Mertak belum mencerminkan prinsip tersebut karena ketiadaan regulasi formal, lemahnya kelembagaan pengelola, tidak adanya mekanisme pemantauan dan sanksi, serta pemanfaatan yang masih bersifat terbuka.

Keterlibatan Masyarakat dalam Konservasi *Mangrove*

Keterlibatan masyarakat dalam konservasi mangrove di Desa Mertak masih tergolong rendah dan bersifat sporadis. Partisipasi masyarakat umumnya terbatas pada kegiatan penanaman

yang dilakukan oleh kelompok pemuda atau pihak eksternal, seperti perguruan tinggi dan organisasi tertentu. Kegiatan tersebut belum mencerminkan konservasi berkelanjutan karena minimnya tindak lanjut berupa pemeliharaan dan pengawasan pasca penanaman.

Selain itu, keterlibatan masyarakat tidak dilakukan secara merata, melainkan hanya oleh sebagian warga yang memiliki kesempatan untuk terlibat. Meskipun masyarakat memahami pentingnya mangrove bagi lingkungan pesisir dan sumber penghidupan, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tindakan pelestarian yang berkelanjutan. Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya praktik penebangan mangrove di beberapa lokasi pesisir akibat rendahnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang mangrove.

Masyarakat Desa Mertak juga dilibatkan dalam forum musyawarah ketika terdapat rencana kegiatan konservasi mangrove. Forum ini menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan awal, seperti penentuan waktu dan lokasi kegiatan. Namun, keterlibatan tersebut masih terbatas pada tahap awal perencanaan dan belum mencakup perencanaan teknis maupun pengelolaan pasca penanaman.

Jika dikaitkan dengan teori *Ladder of Participation* oleh Arnstein (1969), kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada tingkat menengah, yaitu *placation* atau *early partnership*, di mana suara masyarakat mulai dipertimbangkan tetapi belum memiliki kendali penuh. Untuk mencapai tingkat *citizen power*, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, pembentukan kelompok pengelola berbasis masyarakat, serta pendampingan yang berkelanjutan.

**Keterkaitan KEK Mandalika dan Konserasi *Mangrove* **

Pembangunan KEK Mandalika membawa perubahan sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Mertak. Sebagian masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani, nelayan, dan peternak mulai beralih ke sektor pariwisata, baik sebagai tenaga kerja di hotel, restoran, maupun usaha pendukung lainnya. Selain membuka lapangan kerja baru, pembangunan KEK Mandalika juga mendorong perkembangan infrastruktur, seperti pembangunan hotel, homestay, serta akses jalan Bypass BIL–Mandalika.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan KEK Mandalika memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan dan peluang usaha. Namun, ekspansi pembangunan dan meningkatnya aktivitas penduduk juga memberikan tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir, termasuk mangrove.

Menurut Brundtland Report (1987) dalam Cahyandito (2010), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Selaras dengan konsep tersebut, tujuan pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola (Salim, 2010).

Dalam konteks Desa Mertak, pembangunan KEK Mandalika telah mendorong pilar ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja dan pembangunan infrastruktur. Namun, pilar lingkungan belum dikelola secara memadai akibat belum adanya mekanisme perlindungan terhadap ekosistem mangrove. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena ketidakseimbangan antara kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kondisi konservasi mangrove di Desa Mertak masih berada pada tahap awal dan belum dikelola secara optimal. Meskipun vegetasi mangrove masih ditemukan di beberapa titik pesisir, keberadaannya terus mengalami tekanan akibat aktivitas penebangan, penggembalaan ternak, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya pemeliharaan pasca penanaman. Tekanan tersebut semakin meningkat seiring dengan pembangunan pesisir yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Upaya rehabilitasi mangrove telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun belum disertai dengan sistem monitoring dan pengelolaan berkelanjutan, sehingga tingkat keberhasilannya relatif rendah. Di sisi lain, mangrove yang berhasil tumbuh terbukti memberikan manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat pesisir, khususnya sebagai habitat biota perairan yang mendukung mata pencaharian nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove di Desa Mertak belum berjalan secara optimal. Ketiadaan kerangka kelembagaan dan regulasi yang jelas menyebabkan kegiatan konservasi bersifat sporadis dan tidak terarah. Selain itu, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap awal, seperti kegiatan penanaman dan musyawarah, tanpa diikuti peran aktif dalam perencanaan teknis, pemeliharaan, dan pengawasan jangka panjang.

Lemahnya peran kelembagaan lokal, ditandai dengan belum adanya Peraturan Desa (Perdes) dan kelompok pengelola mangrove, menyebabkan pengelolaan mangrove cenderung bersifat *open access*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan eksploitasi berlebih terhadap ekosistem mangrove dan menghambat tercapainya pengelolaan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan KEK Mandalika, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan lingkungan, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan belum terwujud secara menyeluruh.

Oleh karena itu, konservasi mangrove di Desa Mertak memerlukan penguatan kelembagaan lokal, penyusunan regulasi desa yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan mangrove, peningkatan kapasitas serta partisipasi masyarakat, dan integrasi kebijakan lingkungan dalam pembangunan KEK Mandalika. Langkah-langkah tersebut menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyandito, M. F. (2010). Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability Communication dan Sustainability Reporting. *Ssrn, September 2006*, 1–14. https://www.researchgate.net/publication/228221977_Pembangunan_Berkelanjutan_Ekonomi_Dan_Ekologi_Sustainability_Communication_Dan_Sustainability_Reporting
- Dedeh Maryani, R. R. E. N. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish Publisher.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (M. H. Yuliatr Novita (ed.)). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Hadipuro, W. (2022). *Manajemen Sumber Daya Alam Dari Perspektif Ideologis*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Hamit, L. S., Mahardika, I. G., & Rai, I. N. (2025). Analisis Keberlanjutan dan Strategi

- Pengelolaan Ekosistem *Mangrove* di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(3), 585–596. <https://doi.org/10.14710/jil.23.3.585-596>
- Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 1(1), 57–67. <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.18597>
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025). Peta *Mangrove* Nasional Tahun 2024. In *Kementerian Kehutanan Republik Indonesia* (pp. 1–7).
- Kustiawan, W., Hasibuan, A. A., Lubis, N., Fayrozi, M. F., & Maisarah, M. (2023). Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Infrastruktur Nasional di Era Digital. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2), 202–207. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.160>
- Mahameru, Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur Daerah: Systematic Literatur Review. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 9(2), 120–136.
- Melo, R. H., Moko, F., & Saleh, S. E. (2024). Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia: Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan. *Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*, 3(2), 149–154. <https://doi.org/10.37905/geojpg.v3i2.29544>
- Naamy, N. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-dasar & Aplikasinya. In *Rake Sarasin* (Issue Juni).
- Nusa, R. A., & Annisa, F. (2025). Analisis Konsep Arnstein's Ladder Of Participation Dalam Mega Proyek Ibu Kota Nusantara. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 3(3), 5048–5057.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons*. Cambridge University Press, Cambridge. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Qur'ani, J. W., Awaluddin, M., & Amarrohman, F. J. (2019). Analisis Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(2), 40–49. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/23732/21600>
- Rahim, S., K., B., & Wahyuni, D. (2017). *Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya*. Deepublish Publisher.
- Rasyid, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek. In *Jawa Timur: IAIN Kediri Press* (Issue Oktober). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Rizal Irfandi, Nur, M., & Nasir, M. (2023). *PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Pengetahuan, Self-efficacy, Motivasi, dan Sikap* (H. Efriyadi (ed.)). CV Bintang Semesta Media.
- Salim, E. (2010). *Pembangunan Berkelanjutan*. Kepustakaan Populer Gramed.
- Sarie, F., Untarti, A., Amrullah, M. N. K., Robby Firman Syah, Amruddin, W. A. P., Back, S. W., & Dewi Ulfah Arini, Kiki Kunthi Lestari, H. S. (2023). *MENGENAL EKOLOGI SOSIAL* (P. T. Cahyonono (ed.)). Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Sibali, A., Erhanuddin, & Jainuddin. (2025). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kepulauan Selayar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 302–308.
- Sukuryadi, S., Johari, H. I., Nuryaddin, A., & Putra, A. P. (2025). Pemetaan Eksisting Ekosistem *Mangrove* Wilayah Selatan Lombok Tengah Pasca Pembangunan Sirkuit Mandalika Lombok Tengah. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan*

-
- Pendidikan*, 13(1), 126–137. <https://doi.org/10.31764/geography.v13i1.30791>
- Wahyudi, M. A. (2023). No. In *Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat di Desa Kuta Lombok Tengah* (Vol. 183, Issue 2).
- Zakiyah, U., Mulyanto, A. I., & Suprpto, K. D. (2023). *Konservasi Mangrove di Indonesia*. Media Nusa Creative.
- Zubaedi. (2013). *PENGEMBANGAN MASYARAKAT Wacana dan Praktik*. KENCANA.
- Zulkifli, L., Syukur, A., Idrus, A. Al, & Mahrus, M. (2021). Penyuluhan Strategi Konservasi dan Pengembangan Ekowisata *Mangrove* di Desa Mertak Sebagai Daerah Penyangga KEK Mandalika Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 3(2), 1–4. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v3i2.574>